



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG



SEKRETARIS
MAHKAMAH AGUNG
BAGIAN ANGGARAN 005.01

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA BONTANG

SEMESTER I TAHUN 2026

UAKPA

(005.04.1600.652080)

Untuk Periode yang Berakhir
30 Juni Tahun 2026



LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
(005.01.652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Untuk Periode
Semester I
Tahun 2026

BAGIAN ANGGARAN 005.01.1600.652080
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. AWANG LONG NO 69, Telp. 0548-23001 Website: <https://pa-bontang.go.id>
e-mail : pa-bontang@pta-samarinda.net
Bontang Kalimantan Timur 75303

KATA PENGANTAR

Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga merupakan amanat **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**, yang menegaskan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan atas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan akuntansi serta menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang mengacu pada **Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan**, serta prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan keuangan ini disusun dan disajikan dengan menggunakan **basis akrual**, sehingga diharapkan mampu memberikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana peningkatan akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang. Selain itu, laporan ini juga dimaksudkan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bontang, 4 Mei 2026
Sekretaris,



Dra. Rakhmiah, M.H
NIP.19710202203022003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
RINGKASAN	v
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	1
II. NERACA	2
III. LAPORAN OPERASIONAL	3
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	5
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	6
A. PENJELASAN UMUM	6
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.402480) Pengadilan Agama Bontang	6
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	8
A.3. Basis Akuntansi	8
A.4. Dasar Pengukuran	8
A.5. Kebijakan Akuntansi	9
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	13
B.1. Pendapatan	13
B.2. Belanja	14
B.3. Belanja Pegawai	15
B.4. Belanja Barang	15
B.5. Belanja Modal	16
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	19
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	19
C.2. Kas di Bendahara Penerimaan	19
C.3. Kas Lainnya dan Setara Kas	19
C.4. Piutang PNBP	20
C.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	20
C.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	20
C.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar	20
C.8. Belanja Dibayar di Muka	21
C.9. Pendapatan yang Masih Harus Diterima	21
C.10. Persediaan	21
C.11. Persediaan yang Belum Diregister	22
C.12. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	22
C.13. Tagihan Penjualan Angsuran	22
C.14. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	22
C.15. Tanah	23
C.16. Peralatan dan Mesin	23
C.17. Gedung dan Bangunan	24
C.18. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	24
C.19. Aset Tetap Lainnya	25
C.20. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	25
C.21. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	25
C.22. Aset Tak Berwujud	26
C.23. Aset Lain-Lain	26
C.24. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	26

C.25.	Uang Muka dari KPPN	27
C.26.	Utang kepada Pihak Ketiga	27
C.27.	Hibah Yang Belum Disahkan.....	27
C.28.	Pendapatan Yang Ditangguhkan	27
C.29.	Pendapatan Diterima Dimuka	27
C.30.	Ekuitas.....	28
D.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	28
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	28
D.2.	Beban Pegawai.....	28
D.3.	Beban Persediaan	29
D.4.	Beban Barang dan Jasa.....	29
D.5.	Beban Pemeliharaan	29
D.6.	Beban Perjalanan Dinas.....	30
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat.....	30
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	30
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	30
D.10.	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	30
D.11.	Pos Luar Biasa	30
E.	PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	32
E.1.	Ekuitas Awal	32
E.2.	Surplus (Defisit) LO.....	32
E.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar	32
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	34
E.5.	Ekuitas Akhir.....	34
F.	PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	35
F.1.	Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	35
F.2.	Pengungkapan Lain-Lain.....	35
	LAMPIRAN DAN DAFTAR.....	36

PENGADILAN AGAMA BONTANG

Jl. AWANG LONG NO 69, Telp. 0548-23001 Website: <https://pa-bontang.go.id>

e-mail : pa-bontang@pta-samarinda.net

Bontang Kalimantan Timur 75303

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tingkat UAKPA pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode 30 Juni 2026 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bontang, 23 Juli 2026

Sekretaris,



Dra. Rakhmiah, M.H

NIP.19710202203022003

RINGKASAN

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2026 Semester I ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2026.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2026 semester I adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp **4,232,434** atau mencapai 394 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. **1,074,000**

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2026 semester I adalah sebesar Rp. **4,321,118,938**. atau mencapai 63 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp **6,852,930,000**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2026. Nilai Aset per 30 Juni 2026 dicatat dan disajikan sebesar Rp 7,902,147,151 yang terdiri dari Aset Tetap (neto) sebesar Rp **7,880,696,371** dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0.000. dan nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 366,290,707 dan Rp **7,535,856,444**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 4,280,037,384, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp 4,280,037,384 sehingga terdapat defisit sebesar Rp (4,275,354,170) dari Kegiatan Operasional senilai Rp 4,280,037,384. Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 1,184,563,004, 280,037,384 dan sebesar Rp Rp0,00,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp (4,275,354,170).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 7,372,594,106 dikurangi defisit-LO sebesar Rp (4,275,354,170) ditambah dengan koreksi yang menambah ekuitas senilai Rp (30,004) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 4,438,586,504 dan kenaikan/penurunan Ekuitas sebesar 163,262,338 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 30 Juni 2026 adalah senilai Rp 7,535,856,444.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk Tahun 2026 semester I disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (005.01.1600.652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TAHUN 2026 SEMESTER I DAN TAHUN 2026 SMESTER I

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2026				2026			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,074,000	4,232,434	3,158,434	394	0	2,149,050	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,074,000	4,232,434	3,158,434	394	0	2,149,050	(2,149,050)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,074,000	4,232,434	3,158,434	394	0	2,149,050	(2,149,050)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	6,852,930,000	4,321,118,938	(2,530,811,062)	63	3,298,727,000	1,759,663,530	1,539,063,470	53
1. Belanja Pegawai	5,302,253,000	3,384,670,518	(1,917,582,482)	64	1,954,412,000	1,085,295,749	869,116,251	56
2. Belanja Barang	1,499,677,000	885,568,418	(614,108,582)	59	1,154,305,000	484,398,781	669,916,219	42
3. Belanja Modal	51,000,000	50,880,002	(119,998)	100	190,000,000	189,969,000	30,000	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,852,930,000	4,321,118,938	(2,530,811,062)	63	3,298,727,000	1,759,663,530	1,539,063,470	53
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (005.01.1600.652080)
PENGADILAN AGAMA BONTANG

NERACA

PER 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2026

(Dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2026	2026	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	21,000,000	0	21,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	450,780	0	450,780	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	450,780	0	450,780	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	21,450,780	0	21,450,780	
ASET TETAP				
Tanah	2,042,591,548	2,042,591,548	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,651,558,980	3,676,559,978	(25,000,998)	(0.68)
Gedung dan Bangunan	6,109,001,000	6,109,001,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	125,127,109	3,427,109	121,700,000	3,551.10
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,047,582,266)	(3,907,222,241)	(140,360,025)	3.59
JUMLAH ASET TETAP	7,880,696,371	7,924,357,394	(43,661,023)	(0.55)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,950,000	4,950,000	0	0.00
Aset Lain-lain	75,881,000	0	75,881,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(80,830,000)	(4,950,000)	(75,881,000)	1,532.95
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	7,902,147,151	7,924,357,394	(22,210,243)	(0.28)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	345,290,707	551,763,288	(206,472,581)	(37.42)
Uang Muka dari KPPN	21,000,000	0	21,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	366,290,707	551,763,288	(185,472,581)	(33.61)
JUMLAH KEWAJIBAN	366,290,707	551,763,288	(185,472,581)	(33.61)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	7,535,856,444	7,372,594,106	163,262,338	2.21
JUMLAH EKUITAS	7,535,856,444	7,372,594,106	163,262,338	2.21
JUMLAH EKUITAS	7,535,856,444	7,372,594,106	163,262,338	2.21
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,902,147,151	7,924,357,394	(22,210,243)	(0.28)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (005.01.1600.652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2026

LAPORAN OPERASIONAL

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2026	2026	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	4,683,214	2,507,225	2,175,989	86.789
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	4,683,214	2,507,225	2,175,989	86.789
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	4,683,214	2,507,225	2,175,989	86.789
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	3,188,098,554	1,226,734,789	1,961,363,765	159.885
Beban Persediaan	9,960,158	4,566,500	5,393,658	118.114
Beban Barang dan Jasa	505,409,300	273,965,479	230,443,821	84.479
Beban Pemeliharaan	295,732,217	204,918,482	90,813,735	44.307
Beban Perjalanan Dinas	64,596,130	25,017,600	39,578,530	158.203
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	216,241,025	215,012,164	1,228,861	0.572
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,280,037,384	1,950,215,014	2,329,822,370	119.465
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,275,354,170)	(1,947,707,789)	(2,327,646,381)	119.507
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,275,354,170)	(1,947,707,789)	(2,327,646,381)	119.507
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,275,354,170)	(1,947,707,789)	(2,327,646,381)	119.507

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (005.01.1600.652080)
PENGADILAN AGAMA BONTANG

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026 DAN 30 JUNI 2021

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2026	2026	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,372,594,106	7,639,533,643	(266,939,537)	(3.49)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,275,354,170)	(1,947,707,789)	(2,327,646,381)	119.51
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	30,004	477,064,714	(477,034,710)	(99.99)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	30,004	477,064,714	(477,034,710)	(99.99)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,438,586,504	1,772,303,480	2,666,273,024	150.44
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	163,262,338	301,670,405	(138,408,067)	(45.88)
EKUITAS AKHIR	7,535,856,444	7,941,204,048	(405,347,604)	(5.1)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Profil dan Kebijakan Teknis Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.652080) Pengadilan Agama Bontang

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Mahkamah Agung Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 657/SEK/SK/X/2018. Entitas berkedudukan di Jalan Awang Long No69 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Propinsi Kalimantan Timor 75303

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.652080) Pengadilan Agama Bontang berkomitmen dengan visi Mahkamah Agung yaitu “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”, yang bertujuan agar Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya menjadi lembaga yang dihormati, di mana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

- Misi Mahkamah Agung:
 - 1) Menjaga kemandirian badan peradilan.
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.
- Kemudian Visi dan Misi Mahkamah Agung tersebut dijadikan acuan bagi Pengadilan Agama Bontang sebagai Visi dan Misinya.
- Visi Pengadilan Agama Bontang adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang Yang Agung”.
- Visi tersebut dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru Mahkamah Agung RI (2010-2035) dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang :
 - 1) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan
 - 2) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
 - 3) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
 - 4) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
 - 5) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

- 6) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
 - 7) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
 - 8) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
 - 9) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
 - 10) Modern dengan berbasis TI terpadu.
- Misi Pengadilan Agama Bontang adalah :
 - 1) Menjaga kemandirian Peradilan Agama di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang ;
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bontang ;
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bontang ;
 - Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Bontang melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:
 - 1) Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja, serta kondisi Pengadilan Agama Bontang yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum kepada pencari keadilan.
 - 2) Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat (*stakeholder*) pencari keadilan dalam hal kontribusi Pengadilan Agama Bontang dalam wilayah hukumnya;
 - 3) Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Pengadilan Agama Bontang dapat memanfaatkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) serta meminimalisasi segala kelemahan (*weaknesses*) dan hambatan (*threatment*) dalam pelaksanaan tupoksi.
 - Adapun tujuan penyusunan rencana strategis Pengadilan Agama Bontang sebagai berikut :
 - 1) Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kinerja Pengadilan Agama Bontang satu tahun ke depan serta sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.
 - 2) Terwujudnya keterpaduan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Agama Bontang.

Tujuan dan Sasaran Strategis PA Bontang

No	Tujuan dan Sasaran Strategis
1	Tersusunnya dokumen perencanaan taktis strategis pengadilan Agama Bontang yang berfokus pada skala Prioritas strategic
2	Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan Pengadilan Agama Bontang serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan
3	Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Agama Bontang

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2026 semester I ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis SAKTI. SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan Modul Aset pada Sakti adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya..

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Dasar
Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

A.5.1. Pendapatan- LRA

Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5.2. Pendapatan-LO

Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.5.3. Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.4. *Beban*

- Beban
- **Beban** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
 - **Beban** diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
 - **Beban** disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.5.5. *Aset*

- Aset
- **Aset** diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar (1) *Aset Lancar*

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - 2) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh Tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

Piutang telah diserahkan kepada Panitia
Urusan Piutang Negara/DJKN

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - 1) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap (2) *Aset Tetap*

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap (3) *Penyusutan Aset Tetap*

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Tanah
 - 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir Tahun 2025 tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap Tahun 2025 selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada

Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

(4) *Piutang Jangka Panjang*

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

(5) *Aset Lainnya*

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.5.6. Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 - Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- 1) **Kewajiban Jangka Pendek**
 - Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - 2) **Kewajiban Jangka Panjang**
 - Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

A.5.7. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal, bahwa revisi DIPA telah dilakukan sebanyak 4 kali. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Juni 2026	
	ANGGARAN	ANGGARAN
	AWAL	SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan PNB	0	0
Jumlah Pendapatan	0	0
Belanja		
Belanja Pegawai	5,302,253,000	5,302,253,000
Belanja Barang	1,499,677,000	1,499,677,000
Belanja Modal	51,000,000	51,000,000
Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid19	0	0
Jumlah Belanja	6.852.930,000	6.852.930,000

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp 4.232.434,

Realisasi Pendapatan untuk penerimaan Negara Bukan Pajak periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 adalah sebesar Rp 4,232,434. Rincian pendapatan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.1600.652080) Pengadilan Agama Bontang dapat dilihat sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30	30 Juni 2026	% Real Angg.
	Estimasi	Realisasi	
Pendapatan untuk penerimaan Negara Bukan Pajak	0	4,232,434	0
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	0	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah	0	4,232,434	0

Realisasi Pendapatan Tahun 2026 semester I mengalami kenaikan sebesar (394) persen dibandingkan Tahun 2026 semester I yang dapat dirinci sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2026 semester I dan Tahun 2026

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2026	% Naik (Turun)
Pendapatan untuk penerimaan Negara Bukan Pajak	4,232,434	2,149,050	394
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	0	0
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	0	0
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0	0
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	0	0
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0	0
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0
Jumlah	4,232,434	2,149,050	0

3.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara
Rp 4.321.118.938,00

Realisasi Belanja instansi pada Tahun 2026 semester I adalah sebesar Rp. 4,321,118,938,00 atau 63% dari anggaran belanja sebesar Rp. 6,852,930,000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2026 semester I adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2026 semester I

Uraian	30 Juni 2026		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	5,302,253,000	3,384,670,518	64
Belanja Barang	1,499,677,000	885,568,418	59
Belanja Modal	51,000,000	50,880,002	100
Total Belanja Kotor	6,852,930,000	4,321,118,938	63
Pengembalian		0	0
Jumlah	6,852,930,000	4,321,118,938	63

Dibandingkan dengan Tahun 2026 semester I, Realisasi Belanja Tahun 2026 semester I mengalami kenaikan 10 % dibandingkan realisasi belanja pada Tahun 2026 semester I.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahun 2026 semester I dan Tahun 2026 semester I

URAIAN	30 Juni 2026	30 Juni 2026	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	3,384,670,518	1,085,295,749	8
Belanja Barang	885,568,418	484,398,781	17
Belanja Modal	50,880,002	189,969,000	(100)
Belanja Bantuan Sosial	0	0	0
Jumlah	4,321,118,938	1,759,663,530	10

3.3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp 3.384.670.518

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2026 semester I dan Tahun 2026 semester I adalah masing-masing sebesar Rp 3,384,670,518,00 dan Rp 1,085,295,749,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang berstatus non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja pegawai Tahun 2026 semester I mengalami kenaikan sebesar 8 persen dari Tahun 2026 semester I.

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun 2026 semester I dan Tahun 2026 semester I

URAIAN	30 Juni 2026	30 Juni 2026	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3,384,670,518	1,085,295,749	8
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	0
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	0	0	0
Belanja Lembur	0	0	0
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	3,384,670,518	1,085,295,749	8
Pengembalian Belanja Pegawai	0	0	0
Jumlah Belanja	3,384,670,518	1,085,295,749	8

3.4.

Belanja Barang
Rp. 885.568.418,00

Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun 2026 semester I dan Tahun 2026 semester I adalah masing-masing sebesar Rp 885,568,418,00 dan Rp 484,398,781,00. Realisasi Belanja Barang Tahun 2026 semester I mengalami kenaikan sebesar 17% dari Realisasi Belanja Barang Tahun 2026 semester I. Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya belanja barang non operasional dan belanja pemeliharaan sepanjang Tahun 2026 semester I.

Perbandingan Belanja Barang Tahun 2026 semester I dan Tahun 2026 semester I

URAIAN	30 Juni 2026	30 Juni 2026	NAIK (TURUN) %
Belanja Keperluan Perkantoran	416,668,645	525,093,418	20,65%
Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	206,500	852,154	(75,77%)
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	20,050,000	32,520,000	(38,35%)
Belanja Barang Operasional Lainnya	2,456,500	10,498,500	(76,60%)
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000		-
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	9,960,158	15,999,300	(37,75%)
Belanja Langganan Telepon	415,362	3,105,756	86,62%
Belanja Langganan Air	1,330,250	4,084,000	67,40%
Belanja Sewa	30,940,130	54,777,481	41,69%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182,726,160	234,710,711	22,15%
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	47,074,000	11,681,500	75,18%
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65,932,057	127,196,093	48,16%
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64,596,130	70,033,969	7,76%
Jumlah Belanja Kotor	844,796.892	1,090,552,882	22,53%
Pengembalian Belanja	0	0	-
Jumlah Belanja	844,796.892	1,090,552,882	22,53%

B.5. Belanja Modal

Belanja Modal
Rp50.880.002

Realisasi Belanja Modal Tahun 2026 semester I dan Tahun 2026 semester I adalah masing-masing sebesar 50,880,002,00 dan 189,969,000,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada Tahun 2026 semester I mengalami penurunan sebesar 73,22% persen dibandingkan Tahun 2026 semester I disebabkan oleh realisasi anggaran belanja modal untuk Tahun 2026 semester I lebih kecil daripada Tahun 2026 semester I. penurunan yang signifikan ini akibat belanja modal belum terealisasi

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I

URAIAN	30 Juni 2026	30 Juni 2026	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,880,002	360,200,000	85,88
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Lainnya	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	50,880,002	0	100
Pengembalian	0	0	0
Jumlah Belanja	50,880,002	360,200,000	85,88

B.5.1. Belanja Modal Tanah

Belanja Modal
Tanah Rp 0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2026 semester I dan Tahun 2026 semester I adalah masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp0,00. Realisasi tersebut pada Tahun 2026 semester I tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun 2026 semester I.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal
semester I Tahun 2026 dan Tahun 2026**

URAIAN JENIS BELANJA	30 Juni 2026	30 Juni 2026	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0
Belanja Modal Pembebasan Tanah	0	0	0
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tana	0	0	0
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0
Belanja Modal Biaya Pengukuran Tanah	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2026 semester I adalah sebesar Rp 50,880,002,00 atau mengalami penurunan sebesar 85,88% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2026 semester I sebesar Rp 360,200,000.

Rp

Rp,50.880.002,00

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I**

URAIAN	30 Juni 2026	30 Juni 2026	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,880,002	360,200,000	85,88
Jumlah Belanja Kotor	50,880,002	360,200,000	85,88
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	50,880,002	360,200,000	85,88

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja
Modal Gedung dan
Bangunan Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2026 Semester I tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Tahun 2020 Semester I.

**Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan
Bangunan Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025
Semester I**

URAIAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak terdapat
Realisasi Belanja
Modal Jalan, Irigasi
dan Jaringan
Rp0,00

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tahun 2026 Semester I tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Tahun 2025 Semester I.

**Perbandingan Realisasi Belanja Modal
Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025
Semester I**

URAIAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor	0	0	0
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0
Jumlah Belanja	0	0	0

B.5.5. Belanja Modal Lainnya

*Tidak terdapat
Realisasi Belanja
Modal Lainnya
Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2026 Semester I tidak mengalami perubahan dibandingkan Realisasi Tahun 2025 Semester I. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja modal lainnya selama Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I.

B.5.6. Belanja Bantuan Sosial

*Belanja Bantuan
Sosial Rp0,00*

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada Tahun 2026 Semester I tidak mengalami perubahan dibandingkan Tahun 2025 Semester I. Hal ini disebabkan oleh karena tidak tersedianya anggaran belanja bantuan sosial selama Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Keterangan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Rekening Bank	0	0
Uang Tunai	0	0
Kuitansi UP	0	0
Jumlah	0	0

1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Keterangan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Uang Tunai	0	0
Rekening Bank	0	0
Jumlah	0	0

1.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp0,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Keterangan	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas Lainnya dari Hibah	0	0
Jumlah	0	0

4.4. Piutang PNB

Piutang PNB
Rp0,00

Saldo Piutang PNB per tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNB 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Uraian	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Piutang PNB	0	0
Piutang Lainnya	0	0
Jumlah	0	0

4.5. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Bagian
Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TP/TGR 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

No	Nama	30 Juni 2026	30 Juni 2025
1	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

4.6. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian
Lancar TPA
Rp0,00

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Bagian Lancar TPA 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

No	Nama	30 Juni 2026	30 Juni 2025
1	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

4.7. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih–
Piutang Lancar
Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

9.8 Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar
di Muka Rp0,00

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja Dibayar di Muka 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Jenis	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Pembayaran Domain dan Hosting	0	0
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	0	0
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	0	0
Jumlah		0

9.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang
Masih Harus
Diterima Rp0,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Jenis	30 Juni 2026	30 Juni 2025
NIHIL	0	0
	0	0
Jumlah	0	0
Selisih dengan Neraca	-	-

9.10 Persediaan

Persediaan
Rp 0

Nilai Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing adalah sebesar Rp 0 dan Rp 500.000,00.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

Jenis	30 Juni 2026	30 Juni 2025
Barang Konsumsi	0	500,000,00
Barang untuk Pemeliharaan	-	0
Bahan Baku	-	0
Jumlah	15,999,300	12,990,000

Sampai dengan periode yang berakhir per 30 Juni 2026, seluruh pencatatan bahan/barang persediaan dikelompokkan ke dalam barang konsumsi dan barang persediaan untuk pemeliharaan dan berdasarkan hasil opname fisik dinyatakan bahwa semua barang persediaan dalam kondisi baik.

4.11. Persediaan yang Belum Diregister

Persediaan yang
Belum Diregister
Rp 15,999,3000,00

Saldo Persediaan yang Belum Diregister per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0. Saldo Persediaan yang Belum Diregister muncul akibat satuan kerja belum melakukan penyelesaian melalui transaksi GUP atas pembelian barang-barang persediaan.

4.12. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tagihan
TP/TGR Rp0,00

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

No	Debitur	30 Juni 2026	30 Juni 2025
1	NIHIL	0	0
Jumlah		0	0

4.13. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp0,00

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

Rincian Tagihan TPA 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025

No	Debitur	30 Juni 2026	30 Juni 2025
1	NIHIL	0	0
2		0	0
3		0	0
Jumlah		0	0

4.14. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp0,00

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

15. Tanah

Tanah
Rp0,00

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Satuan Kerja di wilayah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.652080) Pengadilan Agama Bontang per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 2,042,591,548,00 dan Rp 2,042,591,548,00

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2026	0
Mutasi tambah:	0
Hibah Masuk	121.700.000
Pengembangan Nilai Aset	-
Mutasi kurang:	0
Akumulasi Penyusutan	0
Saldo per 30 Juni 2026	121.700.000

16. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp 2.141.517.228,00

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp 3,707,296,828,00 dan Rp 3,676,559,978,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2025	3,707,296,828
Mutasi Tambah	52,350,006
Pembelian	52,350,006
Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Transaksi Normalisasi BMN	0
Koreksi Kesalahan input IP	0
Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0
Transfer Masuk	0
Mutasi Kurang	76,161,004
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Transfer Keluar	0
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
Saldo per 30 Juni 2026	3,683,485,830
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(4,047,582,266)

Rincian mutasi tambah dan mutasi kurang untuk aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

17.1
Gedung dan
Bangunan
Rp6.109.001.000,00

Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp6,109,001,000,00 dan Rp6,109,001,000,00. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2026	6.109.001.000
Mutasi tambah:	0
Pembelian	0
Transfer Masuk	0
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Saldo Awal	0
Koreksi Kesalahan input IP	0
Pengembangan Nilai Aset	0
Mutasi kurang:	0
Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi	0
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	0
Saldo per 30 Juni 2026	6.109.001.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	(646.150.734)

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

17.2
Jalan, Jaringan dan
Irigasi Rp0,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Atas aset jalan, irigasi dan jaringan ini dengan mengacu pada hasil kesepakatan dan kebijakan dari Mahkamah Agung RI bahwa untuk setiap aset berupa jalan, jembatan, jaringan dan irigasi untuk yang instalasinya melekat pada gedung agar diakui sebagai aset gedung dan bangunan mengingat aset jalan, jembatan, jaringan dan irigasi bukan merupakan aset yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Pengadilan, maka seharusnya di seluruh satuan kerja di wilayah Kalimantan Timur sudah tidak ada lagi yang memiliki aset ini.

Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2026	0
Mutasi tambah:	0
-	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	0
Nilai Buku per 30 Juni 2026	0

4.19.
Aset Tetap Lainnya
Rp 3.427.109,00

Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp 3,427,109,00,00 dan Rp 3,427,109,00. Mutasi transaksi terhadap aset tetap lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2026	3.427.109
Mutasi tambah:	0
Transfer Masuk	0
Mutasi kurang:	0
Transfer Keluar	0
Saldo per 30 Juni 2026	3.427.109
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	0
Nilai Buku per 30 Juni 2026	3.427.109

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

4.20.
Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4.21.
Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp 4.047.582.266,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing Rp 4,047,582,266,00 dan Rp 3,907,222,241,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

222 Aset Tak Berwujud

Rp 4.950.000,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp4.950.000,00 dan Rp4.950.000,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud salah satunya berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2026	4.950.000
Mutasi tambah:	0
Software	0
Mutasi kurang:	0
Saldo per 30 Juni 2026	4.950.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	4.950.000
Nilai Buku per 30 Juni 2026	0

223 Aset Lain-Lain

Rp0,00

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 30 Juni 2026	0
Mutasi tambah:	0
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	0
Mutasi kurang:	0
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0
Saldo per 30 Juni 2026	0
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2026	0
Nilai Buku per 30 Juni 2026	0

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

224 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Rp 4.950.000,00

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing Rp 4.950.000,00 dan Rp 4.950.000,00. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2026 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Tak Berwujud	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tidak Berwujud	4.950.000	4.950.000	0
2	Aset Lain-Lain	0	0	0
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	0	0	0
	Akumulasi Penyusutan	4.950.000	4.950.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

C.25. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN Rp0,00*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Seluruh Uang Muka dari KPPN ini per 30 Juni 2026 telah selesai dilakukan Ganti Uang Persediaan (GUP) Nihil.

C.26. Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang kepada Pihak
Ketiga Rp.
345.290.707,00*

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 masing-masing sebesar Rp 345,290,707,00 dan Rp 551,763,288,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan bahwa Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar berupa uang makan Juni sedangkan Belanja Barang yang Masih Dibayar berupa tagihan listrik, air, telpon dan pos.

C.27. Hibah Yang Belum Disahkan

*Hibah Yang Belum
Disahkan Rp0,00*

Nilai Hibah Yang Belum Disahkan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Hibah yang belum disahkan merupakan hibah yang sampai dengan tanggal pelaporan sudah diterima dan dicatat oleh satuan kerja pemerintah namun proses registrasinya masih dalam proses pengajuan dan pengesahan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Timur.

C.28. Pendapatan Yang Ditangguhkan

*Pendapatan Yang
Ditangguhkan
Rp0,00*

Pendapatan Yang Ditangguhkan per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.29. Pendapatan Diterima Dimuka

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0,00*

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

4.30. Ekuitas

Ekuitas
Rp 7.535.856.444,00

Ekuitas per 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 7,535,856,444,00 dan Rp 7,372,594,106,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

4.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNBPN
Rp 5,875,300,00

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 4,232,434,00 dan Rp 2,149,050,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I

URAIAN JENIS BEBAM	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0	0	0
Pendapatan Jasa Lainnya	0	0	0
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	0	0	0
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0
Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum	0	0	0
Pendapatan PNBPN	4,232,434	2,149,050	49,23

Terhadap pendapatan yang diperoleh dalam laporan operasional ini, diperoleh dari total pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ditambah Pendapatan non kas dan piutang atau pendapatan ditangguhkan dikurangi dengan Pendapatan dibayar di muka.

4.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai
Rp 3.384.670.518,00

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah masing-masing sebesar Rp,3,384,670,518 dan Rp 1,085,295,749. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I

URAIAN JENIS BEBAN	30 Juni 2026	30 Juni 2025	Naik (Turun) %
Beban gaji dan tunjangan PNS	3,384,670,518	1,085,295,749	0
Beban gaji dan Tunjangan TNI/Polri	0	0	0
Beban Gaji dan Tunjangan pegawai Non PNS	0	0	0
Jumlah	3,384,670,518	1,085,295,749	67,94

0.3.1 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp 9.960.158,00

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah masing-masing sebesar Rp 9,960,158,00 dan Rp 4,566,500,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I

URAIAN JENIS BEBAN	30Juni 2026	30Juni2025	Naik (Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	9,960,158	4,566,500	54,15
Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	0	0
Beban Persediaan bahan baku	0	0	0
Beban Persediaan barang hasil sitaan	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
Jumlah	9,960,158	4,566,500	54,15

0.4.1 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan
Jasa
Rp 505.409.300,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah masing-masing sebesar Rp 505,409,300,00 dan Rp 273,965,479,00. Dibandingkan dengan Tahun 2025 Semester I, Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 Semester I mengalami kenaikan sebesar (45,79%).

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Kenaikan Beban Barang dan Jasa terjadi karena adanya tambahan kegiatan pendidikan dan pelatihan pada Tahun 2026 Semester I. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I

URAIAN JENIS BEBAN	30Juni2026	30Juni2025	Naik (Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	416,668,645	525,093,418	20,65
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	206,500	852,154	75,77
Beban Honor Operasional satuan Kerja	20,050,000	32,520,000	38,35%
Beban Barang Operasional Lainnya	2,456,500	10,498,500	76,60
Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0	0
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	9,960,158	15,999,300	37,75
Belanja Langganan Telepon	415,362	3,105,756	86,62
Belanja Langganan Air	1,331,250	4,084,000	67,40
Belanja Sewa	31,940,130	54,777,481	41,69
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182,726,160	234,710,711	22,15
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	47,074,000	11,681,500	75,18
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65,932,057	127,196,093	48,16
Jumlah	505,409,300	273,965,479	45,79



Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp295.732.217,00

Beban Pemeliharaan Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah masing-masing sebesar Rp.295,732,217,00 dan Rp204,918,482,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

0.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp 64.596.130,00*

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2026 Semester I adalah masing-masing sebesar Rp 64,596,130,00 dan Rp 25,017,600,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan daerah dan surveillance ZI dan APM.

0.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0,00*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (005.01.652080) Pengadilan Agama Bontang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

0.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial Rp0,00*

Beban Bantuan Sosial Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9.1 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp216.241.025,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2026 Semester I adalah masing-masing sebesar Rp 216,241,025,00 dan Rp 215,012,164,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	NAIK (TURUN) %		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	212.447.179	230.482.139	(7,82)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	183.710.545	183.710.545	0
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Jumlah Penyusutan	396.157.724	414.192.684	(4,35)
Beban Amortisasi Aset Lainnya	618.750	1.237.500	(50,00)
Beban Penyusutan Aset Lainnya	0	0	0
Jumlah Amortisasi	618.750	1.237.500	(50,00)
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	216,241,025	215,012,164	(0,57)

D.10.1 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,00

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

D.11 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa
RpRp0,00,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I

URAIAN	31 Desember 2021 31 Desember 2020		NAIK (TURUN) %
Pendapatan Luar Biasa	0	0	0
Beban Keperluan Mendesak/Tak Terduga	0	0	0
Beban Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	0	0	0
Jumlah	0	0	0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

1.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp 7,535.856.444,00

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2026 dan 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 7,372,594,106,00 dan Rp 7,639,533,643,00.

1.2. Surplus (Defisit) LO

Defisit-LO
Rp(3,385,879,109,00)

Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir pada Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah sebesar Rp (4,275,354,170.00) dan Rp(1,947,707,789). Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

1.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

E.3.1. Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
Rp(30,004,00)

Nilai Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah sebesar Rp(30,004),00 dan Rp(477,064,714),00.

E.3.2. Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0,00

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.3. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah/(kurang) atas nilai persediaan untuk Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk Tahun 2025 Semester I adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	0
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0
Jumlah	0

E.3.4. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,00

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan 0,00.

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tetap Per 30 Juni 2026

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Revaluasi Aset Tetap	0
Koreksi Nilai Aset Lainnya	0
Jumlah	0

E.3.5. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp30,004,00

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah sebesar Rp(30,004,00) dan Rp (477,064,714). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2026 Semester I

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(30,004,00)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0
Jumlah	(30,004,00)

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi terjadi di satuan kerja terhadap asset-aset yang tercatat dalam kelompok asset yang tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung RI namun hanya perubahan nama dan kodifikasi asetnya dan tidak merubah nilainya.

E.3.6. Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain
RP 0.00

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2026 Semester I adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	0
Ekuitas Transaksi Lainnya	0
Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0
SAL Selisih Kurs Belum Terealisasi	0
Penyesuaian SAL BLU	0
Jumlah	0

E.4 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp 4.438.586.504,00

Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada Tahun 2026 Semester I dan Tahun 2025 Semester I adalah sebesar Rp 4,438,586,504,00 dan Rp1,772,313,480,00. terdiri dari:

E.41
Transfer Keluar
Rp357.209,00

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Masuk Per Satker

No	Kode	Uraian	Transfer Keluar	Kode Masuk	Uraian Masuk	Transfer Masuk
1	005.01.663057	Dirjen Badilag	0	005.01.402480	Alat Scanner	357.209
		JUMLAH	0		JUMLAH	357.209

E.41
Transfer Keluar
Rp357.209,00

sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Transfer Keluar Per Satker

No	Kode	Uraian	Transfer Keluar	Kode Masuk	Uraian Masuk	Transfer Masuk
1	-	-	0	-	-	0
		JUMLAH	0		JUMLAH	0

E.4.1.
Pengesahan Hibah
Langsung Langsung
Rp 121.700.000,00

Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 sebesar Rp 121.700.000,00 yang diterima sepanjang 2026.

Rincian pengesahan Hibah untuk periode 30 Juni 2026

No	Bentuk Hibah	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
3.	Renovasi Gedung PA Bontang	Pemerintah Kota Bontang	Langsung	121.700.000
	Total Pengesahan			
	Jumlah			121.700.000

Ekuitas Akhir

E.5.

Ekuitas Akhir
Rp 7,535.856.444,00

Nilai Ekuitas pada 30 Juni 2026 dan 30 Juni 2025 adalah masing-masing sebesar Rp 7,535,856,444,00 dan Rp 7,941,204,048,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

1. Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.
2. Terdapat Jurnal Penyesuaian Pengesahan Hubah Yang telah dilakukan pengesahan yaitu:
 - a. Hibah dari Comtelindo Bontang berupa Hibah Langsung Barang (Ac 1 PK, Infocus, dan Speker) kepada PA Bontang, pengesahannya dilakukan secara hibah langsung TYAL (133211) yang Bast penyerahan Barangnya Pada bulan Juni tahun 2025 dengan nilai sebesar Rp.11.500.000
 - b. Hibah dari BRI Cabang Bontang berupa Hibah Langsung Berupa Barang (1 Unit AC 2 PK) Kepada di PA Bontang yang pengesahannya dilakukan secara hibah langsung (133211) yang Bast penyerahan Barangnya pada Bulan Februari Tahun 2026 dengan nilai sebesar Rp. 6.500.000
 - c. Hibah dari Pemerintah kota Bontang berupa Hibah Langsung Renovasi sebagian Gedung Kantor PA Bontang (130211) yang Bast penyerahan Barangnya pada Bulan April Tahun 2026 dengan nilai sebesar Rp. 263.963.232
 - d. Hibah dari IMM (PT Indominco Mandiri) berupa Hibah Langsung Berupa Barang (2 Unit TV) Kepada di PA Bontang yang pengesahannya dilakukan secara hibah langsung (133211) yang Bast penyerahan Barangnya pada Bulan Juli tahun 2026 dengan nilai sebesar Rp. 12.124.000
3. Terdapat Jurnal Penyesuaian Beban Yang Masih Harus Dibayar yaitu:
 - a. Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Bulan Juni 2026 sebesar RP 26.000
 - b. Beban Langganan Air Bulan Juni 2026 sebesar Rp 130.750
 - c. Beban Langganan Telepon Bulan Juni 2026 sebesar Rp 164.719
 - d. Beban Keperluan Perkantoran Belanja Barang Jasa Langganan Internet Bulan Juni 2026 sebesar Rp 2.149.283

G. PENGUNGKAPAN CAPAIAN RINCIAN OUTPUT

G1. Pengungkapan Capaian Rincian Output per Fungsi APBN

Pelaporan data capaian output merupakan bagian dari mana pelaksanaan anggaran yang bertujuan untuk mewujudkan belanja berkualitas sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja. Selain itu, data capaian output dipergunakan dalam rangka penilaian kinerja anggaran. Batas akhir pelaporan bagi Satker **paling lambat 5 hari kerja pada bulan berikutnya**. Pengadilan Agama yakni Satker 652080 Badan Urusan Administrasi

Uraian		PAGU	REALISASI	%	TARGET RO	REALISASI RO	%	SATUAN
KODE FUNGSI 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN								
KODE SUB FUNGSI 03.04 PERADILAN								
WA	Program Dukungan Manajemen	6,852,930,000	4,321,119,013	63.1 %	—	—	—	—
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	51,000,000	50,880,002	99.8 %	—	—	—	—
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	51,000,000	50,880,002	99.8 %	—	—	—	—
951	Layanan Sarana Internal	51,000,000	50,880,002	99.8 %	9	9	100 %	Unit
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	6,801,930,000	4,270,239,011	62.8 %	—	—	—	—
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,801,630,000	4,269,939,011	62.8 %	—	—	—	—
962	Layanan Umum	1,440,000	1,440,000	100 %	1	1	100 %	Layanan
994	Layanan Perkantoran	6,800,190,000	4,268,499,011	62.8 %	2	0	0 %	Layanan
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	300,000	300,000	100 %	—	—	—	—
Z25	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	300,000	300,000	100 %	1	1	100 %	Dokumen

LAMPIRAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BONTANG 652080

Tgl Data : 14/07/26 3:44 AM
Tgl Cetak : 14/07/26 7:18 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1,074,000	4,232,434	3,158,434	394	0	2,149,050	(2,149,050)	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,074,000	4,232,434	3,158,434	394	0	2,149,050	(2,149,050)	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	1,074,000	4,232,434	3,158,434	394	0	2,149,050	(2,149,050)	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	6,852,930,000	4,321,118,938	(2,531,811,062)	63	3,298,727,000	1,759,663,530	1,539,063,470	53
1. Belanja Pegawai	5,302,253,000	3,384,670,518	(1,917,582,482)	64	1,954,412,000	1,085,295,749	869,116,251	56
2. Belanja Barang	1,499,677,000	885,568,418	(614,108,582)	59	1,154,315,000	484,398,781	669,916,219	42
3. Belanja Modal	51,000,000	50,880,002	(119,998)	100	190,000,000	189,969,000	31,000	100
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA BONTANG 652080

Tgl Data : 14/07/26 3:44 AM
Tgl Cetak : 14/07/26 7:18 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2026				2025			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	6,852,930,000	4,321,118,938	(2,531,811,062)	63	3,298,727,000	1,759,663,530	1,539,063,470	53
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 23 Juli 2026
Penanggung Jawab UAKPA KUASA
PENGGUNA ANGGARAN

RAKHMITAH
NIP 197102022003022003

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA ESELON I : (005) MAHKAMAH AGUNG
: (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
SATUAN : (PENGADILAN AGAMA
KERJA 652080) BONTANG

Tgl Data : 20/01/26 7:50 AM
Tgl Cetak : 20/01/26 2:36 PM
Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	216,241,025	215,012,164	1,228,861	0.572
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,280,037,384	1,950,215,014	2,329,822,370	119.465
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,275,354,170)	(1,947,707,789)	(2,327,646,381)	119.507
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,275,354,170)	(1,947,707,789)	(2,327,646,381)	119.507
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,275,354,170)	(1,947,707,789)	(2,327,646,381)	119.507

BONTANG, 23 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA KUASA PENGGUNA

ANGGARAN



RAKHMAH

NIP 197102022003122003

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 JUNI 2026
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 14/07/26 12:34 AM
 Tgl Cetak : 14/07/26 7:17 AM
 Halaman : 1
 lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2026	2025	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	7,372,594,106	7,639,533,643	(266,939,537)	(3.49)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,275,354,170)	(1,947,707,789)	(2,327,646,381)	119.51
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	30,004	477,064,714	(477,034,710)	(99.99)
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	30,004	477,064,714	(477,034,710)	(99.99)
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	4,438,586,504	1,772,313,480	2,666,273,024	150.44
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	163,262,338	301,670,405	(138,408,067)	(45.88)
EKUITAS AKHIR	7,535,856,444	7,941,204,048	(405,347,604)	(5.1)

Keterangan :
 FINAL

BONTANG, 23 Juli 2026
 Penanggung Jawab UAKPA KUASA

PENGUNA ANGGARAN

 RAKHMIAH
 NIP 197102022003122003

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 30 JUNI 2026
 (DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 WILAYAH/PROVINSI : (1600) KALIMANTAN TIMUR
 SATUAN KERJA : (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG

Tgl Data : 14/07/26 3:44 AM
 Tgl Cetak : 14/07/26 7:19 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	21,000,000	0	21,000,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	450,780	0	450,780	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	450,780	0	450,780	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	21,450,780	0	21,450,780	
ASET TETAP				
Tanah	2,042,591,548	2,042,591,548	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,651,558,980	3,676,559,978	(25,000,998)	(0.68)
Gedung dan Bangunan	6,109,001,000	6,109,001,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	125,127,109	3,427,109	121,700,000	3,551.10
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,047,582,266)	(3,907,222,241)	(140,360,025)	3.59
JUMLAH ASET TETAP	7,880,696,371	7,924,357,394	(43,661,023)	(0.55)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,950,000	4,950,000	0	0.00
Aset Lain-lain	75,881,000	0	75,881,000	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(80,831,000)	(4,950,000)	(75,881,000)	1,532.95
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	7,902,147,151	7,924,357,394	(22,210,243)	(0.28)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	345,290,707	551,763,288	(206,472,581)	(37.42)
Uang Muka dari KPPN	21,000,000	0	21,000,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	366,290,707	551,763,288	(185,472,581)	(33.61)
JUMLAH KEWAJIBAN	366,290,707	551,763,288	(185,472,581)	(33.61)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	7,535,856,444	7,372,594,106	163,262,338	2.21
JUMLAH EKUITAS	7,535,856,444	7,372,594,106	163,262,338	2.21
JUMLAH EKUITAS	7,535,856,444	7,372,594,106	163,262,338	2.21
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	7,902,147,151	7,924,357,394	(22,210,243)	(0.28)

Keterangan :

FINAL

BONTANG, 23 Juli 2026
 Penanggung Jawab UAKPA KUASA
 PENGGUNA ANGGARAN

 RAKHMIAH
 NIP.197102022003122003

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	450,780	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	5,480,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	9,100,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,297,208	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	1,609,250	0
3.0	522141	Beban Sewa	45,911,760	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	253,048,894	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	35,400,000	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118,173,692	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	39,343,213	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	291,871,158	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	138,817,525	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	9,988,500	0
JUMLAH			15,494,013,386	15,494,013,386

BONTANG, 4 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

RAKHIMIAH
NIP. 197102022003122003

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 JUNI 2026

(DALAM RUPIAH)

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	4,321,118,938
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	4,232,434	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	4,232,434
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	494,724,380	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	8,560	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	30,486,230	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	10,567,888	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	12,160,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	14,400,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4,086,381	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	28,098,960	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	60,178,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	13,120,000	0
3.0	511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	32,400,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	525,950,704	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	2,027,500,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	96,059,600	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2,650	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	5,964,284	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,293,211	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,775,495	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	15,333,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	6,561,250	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	416,668,645	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	206,500	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	20,050,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	2,456,500	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	9,960,158	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	40,471,526	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	415,362	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	1,331,250	0
3.0	522141	Belanja Sewa	31,940,130	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	182,726,160	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	47,074,000	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	65,932,057	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	64,596,130	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	50,880,002	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	75

JUMLAH	4,325,351,447	4,325,351,447

BONTANG, 23 Juli 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RAKHIMIAH

NIP. 197102022003122003

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT SUMBER DANA/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2026**

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah							
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal							
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51,000,000	51,000,000	50,880,002	0	50,880,002	99.76	119,998
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	51,000,000	51,000,000	50,880,002	0	50,880,002	99.76	119,998
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	51,000,000	51,000,000	50,880,002	0	50,880,002	99.76	119,998
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 1071.EBB	51,000,000	51,000,000	50,880,002	0	50,880,002	99.765	119,998
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN1071	51,000,000	51,000,000	50,880,002	0	50,880,002	99.76	119,998
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal							
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	617,340,000	685,471,000	494,724,380	0	494,724,380	72.17	190,746,620
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,000	20,000	8,560	75	8,485	42.43	11,515
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	65,868,000	55,868,000	30,486,230	0	30,486,230	54.57	25,381,770
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22,424,000	22,424,000	10,567,888	0	10,567,888	47.13	11,856,112
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	28,140,000	12,160,000	0	12,160,000	43.21	15,980,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	39,270,000	39,270,000	14,400,000	0	14,400,000	36.67	24,870,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	101,368,000	31,368,000	4,086,381	0	4,086,381	13.03	27,281,619
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	50,405,000	50,405,000	28,098,960	0	28,098,960	55.75	22,306,040
511129	Belanja Uang Makan PNS	120,000,000	120,000,000	60,178,000	0	60,178,000	50.15	59,822,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,066,000	10,066,000	13,120,000	0	13,120,000	130.34	(3,054,000)
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	64,800,000	64,800,000	32,400,000	0	32,400,000	50	32,400,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	1,119,701,000	1,107,832,000	700,230,399	75	700,230,324	63.21	407,601,676
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	122,536,000	843,430,000	525,950,704	0	525,950,704	62.36	317,479,296
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	844,200,000	3,302,004,000	2,027,500,000	0	2,027,500,000	61.4	1,274,504,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	966,736,000	4,145,434,000	2,553,450,704	0	2,553,450,704	61.6	1,591,983,296
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	30,000	30,000	96,059,600	0	96,059,600	320198.67	(96,029,600)
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	5,000	2,650	0	2,650	53	2,350
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	30,000	30,000	5,964,284	0	5,964,284	19880.95	(5,934,284)
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	30,000	30,000	1,293,211	0	1,293,211	4310.7	(1,263,211)
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	30,000	30,000	5,775,495	0	5,775,495	19251.65	(5,745,495)
511628	Belanja Uang Makan PPPK	48,852,000	48,852,000	15,333,000	0	15,333,000	31.39	33,519,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,000	10,000	6,561,250	0	6,561,250	65612.5	(6,551,250)
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	48,987,000	48,987,000	130,989,490	0	130,989,490	267.4	(82,002,490)

	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	2,135,424,000	5,302,253,000	3,384,670,593	75	3,384,670,518	63.83	1,917,582,482
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	768,933,000	745,018,000	416,668,645	0	416,668,645	55.93	328,349,355
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,200,000	1,200,000	206,500	0	206,500	17.21	993,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	48,120,000	48,120,000	20,050,000	0	20,050,000	41.67	28,070,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	3,000,000	2,456,500	0	2,456,500	81.88	543,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	823,253,000	797,338,000	439,381,645	0	439,381,645	55.11	357,956,355
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,800,000	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,800,000	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	100	0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,000,000	20,000,000	9,960,158	0	9,960,158	49.8	10,039,842
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	20,000,000	20,000,000	9,960,158	0	9,960,158	49.8	10,039,842
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	107,580,000	86,064,000	40,471,526	0	40,471,526	47.02	45,592,474
522112	Belanja Langganan Telepon	1,200,000	1,200,000	415,362	0	415,362	34.61	784,638
522113	Belanja Langganan Air	2,400,000	2,400,000	1,331,250	0	1,331,250	55.47	1,068,750
522141	Belanja Sewa	62,540,000	63,040,000	31,940,130	0	31,940,130	50.67	31,099,870
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	173,720,000	152,704,000	74,158,268	0	74,158,268	48.56	78,545,732
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	218,220,000	249,309,000	182,726,160	0	182,726,160	73.29	66,582,840
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	49,560,000	47,082,000	47,074,000	0	47,074,000	99.98	8,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	160,680,000	152,444,000	65,932,057	0	65,932,057	43.25	86,511,943
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	428,460,000	448,835,000	295,732,217	0	295,732,217	65.89	153,102,783
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Dinas Biasa							
524111		79,060,000	79,060,000	64,596,130	0	64,596,130	81.71	14,463,870
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	79,060,000	79,060,000	64,596,130	0	64,596,130	81.71	14,463,870
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,526,293,000	1,499,377,000	885,268,418	0	885,268,418	59.04	614,108,582
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 6986.EBA	3,661,717,000	6,801,630,000	4,269,939,011	75	4,269,938,936	62.778	2,531,691,064
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal							
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
	JUMLAH BELANJA OUTPUT 6986.EBD	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
	JUMLAH BELANJA KEGIATAN6986	3,662,017,000	6,801,930,000	4,270,239,011	75	4,270,238,936	62.78	2,531,691,064
	JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01	3,713,017,000	6,852,930,000	4,321,119,013	75	4,321,118,938	63.06	2,531,811,062
	JUMLAH BELANJA	3,713,017,000	6,852,930,000	4,321,119,013	75	4,321,118,938	63.06	2,531,811,062

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2026

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	617,340,000	685,471,000	494,724,380	0	494,724,380	72.17	190,746,620
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	20,000	20,000	8,560	75	8,485	42.43	11,515
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	65,868,000	55,868,000	30,486,230	0	30,486,230	54.57	25,381,770
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	22,424,000	22,424,000	10,567,888	0	10,567,888	47.13	11,856,112
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	28,140,000	28,140,000	12,160,000	0	12,160,000	43.21	15,980,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	39,270,000	39,270,000	14,400,000	0	14,400,000	36.67	24,870,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	101,368,000	31,368,000	4,086,381	0	4,086,381	13.03	27,281,619
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	50,405,000	50,405,000	28,098,960	0	28,098,960	55.75	22,306,040
511129	Belanja Uang Makan PNS	120,000,000	120,000,000	60,178,000	0	60,178,000	50.15	59,822,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,066,000	10,066,000	13,120,000	0	13,120,000	130.34	(3,054,000)
511157	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	64,800,000	64,800,000	32,400,000	0	32,400,000	50	32,400,000
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	122,536,000	843,430,000	525,950,704	0	525,950,704	62.36	317,479,296
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	844,200,000	3,302,004,000	2,027,500,000	0	2,027,500,000	61.4	1,274,504,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	30,000	30,000	96,059,600	0	96,059,600	320,198.67	(96,029,600)
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	5,000	5,000	2,650	0	2,650	53	2,350
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	30,000	30,000	5,964,284	0	5,964,284	19,880.95	(5,934,284)
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	30,000	30,000	1,293,211	0	1,293,211	4,310.7	(1,263,211)
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	30,000	30,000	5,775,495	0	5,775,495	19,251.65	(5,745,495)
511628	Belanja Uang Makan PPPK	48,852,000	48,852,000	15,333,000	0	15,333,000	31.39	33,519,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,000	10,000	6,561,250	0	6,561,250	65,612.5	(6,551,250)
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	2,135,424,000	5,302,253,000	3,384,670,593	75	3,384,670,518	63.83	1,917,582,482
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	768,933,000	745,018,000	416,668,645	0	416,668,645	55.93	328,349,355
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,200,000	1,200,000	206,500	0	206,500	17.21	993,500
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	48,120,000	48,120,000	20,050,000	0	20,050,000	41.67	28,070,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	5,000,000	3,000,000	2,456,500	0	2,456,500	81.88	543,500
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,800,000	1,440,000	1,440,000	0	1,440,000	100	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	20,000,000	20,000,000	9,960,158	0	9,960,158	49.8	10,039,842
522111	Belanja Langganan Listrik	107,580,000	86,064,000	40,471,526	0	40,471,526	47.02	45,592,474
522112	Belanja Langganan Telepon	1,200,000	1,200,000	415,362	0	415,362	34.61	784,638
522113	Belanja Langganan Air	2,400,000	2,400,000	1,331,250	0	1,331,250	55.47	1,068,750
522141	Belanja Sewa	62,540,000	63,040,000	31,940,130	0	31,940,130	50.67	31,099,870
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	218,220,000	249,309,000	182,726,160	0	182,726,160	73.29	66,582,840
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	49,560,000	47,082,000	47,074,000	0	47,074,000	99.98	8,000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	160,680,000	152,444,000	65,932,057	0	65,932,057	43.25	86,511,943
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	79,060,000	79,060,000	64,596,130	0	64,596,130	81.71	14,463,870

	JUMLAH BELANJA BARANG	1,526,593,000	1,499,677,000	885,568,418	0	885,568,418	59.05	614,108,582
53	BELANJA MODAL							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	51,000,000	51,000,000	50,880,002	0	50,880,002	99.76	119,998
	JUMLAH BELANJA MODAL	51,000,000	51,000,000	50,880,002	0	50,880,002	99.76	119,998
	JUMLAH RUPIAH MURNI	3,713,017,000	6,852,930,000	4,321,119,013	75	4,321,118,938	63.06	2,531,811,062
	TOTAL	3,713,017,000	6,852,930,000	4,321,119,013	75	4,321,118,938	63.06	2,531,811,062

**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATKER
PERIODE TA. 2026 SEMESTER I**

Kode BA dan Nama K/L: (005) Mahkamah Agung				
Kode E4 dan Nama E4: (01) Badan Urusan Administrasi				
Kode Wilayah dan Nama Wilayah: (1600) KALIMANTAN TIMUR				
Kode Satker dan Nama Satker: (652080) PENGADILAN AGAMA BONTANG				

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	✓		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓		Ada

KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2020?	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca <i>Balance</i>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "		✓	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	✓		Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	✓		Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>			

NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada"? (Cek di e-Rekon&LK, menu <i>Daftar >> Akun Non Ref</i>)		✓	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu " <i>Daftar >> Saldo Tidak Normal</i> "), kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "		✓	Tidak

TELAAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		✓	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (<i>Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN</i>)		✓	Tidak

Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
2.	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (<i>Cek di Neraca Percobaan saldo awal</i>)		√	Ya/Tidak
2.	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2021? (<i>untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan 2021</i>)		√	Ya
3.	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?		√	Tidak
<i>Sehubungan terbitnya Surat S-876/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatannya hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.</i>				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211?		√	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		√	Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		√	Ya
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		√	Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya		√	Ya
6.	Apakah Saldo akun 391130-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah	√		Ya
<i>saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon</i>				
Akun 303221-Transfer Masuk (TM) dan akun 303211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK	0		
<i>Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?</i>				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan	0		
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan <i>kecuali</i> BA.015.04 ?		√	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx		√	Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak

4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		√	Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		√	Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		√	Ya/Tidak
2.	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
TELAAH TERKAIT BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		√	Tidak
2.	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? (cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		√	Tidak
2.	Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		√	Tidak
3.	Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593301 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511	Rp -		
2.	Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593301	Rp -		
3.	Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593301	Rp -		
4.	Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		√	Tidak
Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.				
5.	Adakah akun 491511/593301 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk (M07)		√	Tidak
Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593301, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07				
6.	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	√		Ya/Tidak
7.	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19?	√		Ya
LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2.	Adakah pendapatan Hibah	√		Ada
3.	Adakah beban bunga		√	Tidak
4.	Adakah beban subsidi		√	Tidak
5.	Adakah beban hibah		√	Tidak

6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak
		√	
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)		√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya
Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	√		Ya
Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.			
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		√	Tidak
Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Sama
Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	√		Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		√	Tidak
Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)			
3. Dari kolom perbandingan antara 30 Juni 2021 dengan 30 Juni 2020 adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Semester I 2020, Apakah demikian?	√		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya

2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		√	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	√		Ada/Tidak
- 593301-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	√		Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		N/A	Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		N/A	Ya
Pengecekan Jurnal Akrual	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425130/2/3 atau 42492x)?	√		Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?		√	Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?	√		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		√	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	√		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	√		Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN			
	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan Juni 2021 di e-Rekon&LK?		√	Tidak
Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"			
3. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		√	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?			Ya
Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")	√		
MENU DAFTAR BMN			
	Seharusny	Ya	Tidak
1 Adakah Nilai Perolehan Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		√
2 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)	-		

3 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)	-		
4 Adakah Nilai Buku Minus (Intrakomptabel)?	Tidak		√
5 Berapa NUP BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi jumlah NUP)	-		
6 Berapa Total Nilai BMN dengan Nilai Perolehan Minus? (diisi nilai rupiahnya)	-		
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? <i>(Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus)</i>		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja " <i>tidak ada</i> " pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		√	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		√	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			
Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.			
Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2020 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	√		
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-In Reval dengan benar ?	√		
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2020</i>			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara Stock Opname Persediaan ?	√		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	√		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		√	Tidak
4. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)		N/A	Ya
5. Adakan PNPB digunakan langsung?		√	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?		N/A	Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	√		Ya
8.			Ya
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	√		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	√		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN (Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri) telah secara memadai sesuai format ?	√		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	√		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	√		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			

7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?			Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?			Ya
9 Apakah belanja dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 telah dijelaskan dalam CaLK?			Ya
ANALISIS LAINNYA			
Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional			Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang			Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021			Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)			Ya
Pengungkapan Dampak dan Penanganan Pandemi COVID-19			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - LRA	Ada	Tidak	
1. Apakah terdapat pengungkapan atas <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19		√	
2. Jika terdapat <i>Refocussing</i> kegiatan/Realokasi anggaran/Revisi DIPA terkait penanganan Pandemi Covid-19, berapa nominal perubahannya (kenaikan/penurunan) pada total anggaran K/L	Rp		
3. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Estimasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19		√	
4. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Pendapatan (Pajak dan/atau PNBPN) khususnya sebagai dampak Pandemi Covid-19		√	
5. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		√	
6. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Belanja dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19		√	
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Operasional	Ada	Tidak	
7. Apakah terdapat pengungkapan atas perubahan Realisasi Pendapatan - LO (Pajak dan/atau PNBPN) sebagai dampak Pandemi Covid-19		√	
8. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun Non penanganan pandemi Covid-19		√	
9. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi Beban dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dengan menggunakan akun penanganan pandemi Covid-19		√	
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Laporan Perubahan Ekuitas	Ada	Tidak	
10. Apakah terdapat pengungkapan atas Transaksi Antar Entitas berupa Transfer Masuk – Transfer Keluar, dapat berupa pengiriman barang persediaan, peralatan dan mesin berupa alat kesehatan, dan/atau jenis-jenis BMN lainnya yang spesifik untuk penanganan pandemi COVID-19.		√	
11. Apakah terdapat pengungkapan atas realisasi pengesahan hibah langsung baik berupa uang, barang, maupun jasa yang diterima oleh K/L dalam rangka penanganan pandemi COVID-19		√	
Kecukupan pengungkapan pada CaLK - Neraca	Ada	Tidak	
12. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Aset, antara lain :		√	
a. Kenaikan/penurunan Piutang sebagai dampak pandemi Covid-19		√	

b. Kenaikan/penurunan Persediaan sebagai dampak pandemi Covid-19		✓
c. Kenaikan/penurunan KDP sebagai dampak pandemi Covid-19		✓
d. Kenaikan/penurunan pos aset yang lain, sebutkan		✓
13. Apakah terdapat pengungkapan atas Pos Kewajiban, antara lain :		✓
a. Kenaikan/penurunan Utang kepada pihak ketiga sebagai dampak pandemi Covid-19		✓
b. Kenaikan/penurunan Hibah yang belum disahkan sebagai dampak pandemi Covid-19		✓

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"



Mengetahui,

Rejabat Penyusun LKKL

Fathul Majid, S.H.I

NIP. 198005302006042013

Bontang, 23 Juli 2026

Penelaah

Fathul Majid, S.H.I

NIP. 198005302006042013



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KPPN SAMARINDA

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 652080 – PENGADILAN AGAMA BONTANG
SAMPAI DENGAN PERIODE 2026-06

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	6,852,930,000	6,852,930,000	0
2	Belanja	4,321,119,013	4,321,119,013	0
3	Pengembalian Belanja	-75	-75	0
4	Estimasi Pendapatan	1,074,000	1,074,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,232,434	4,232,434	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	21,000,000	21,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	21,000,000	21,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	121,700,000	121,700,000	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13 Juli 2026





**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Jalan Awang Long No. 69 Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang
Telp. 0548-23001 – WhatsApp 0813-51256098
<http://www.pa-bontang.go.id/> Surel: kantor.pabontang@gmail.com

SURAT PENGANTAR

NOMOR : 249/SEK.PA.W17-A6/KU1.0.1/VII/2026

Kepada

Yth: Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda

Di -

Samarinda

NO	JENIS SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
	Pengiriman: LK satker 652080 Semester I tahun 2026	1 (satu) Bundel	Disampaikan dengan hormat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. Terima Kasih .

Bontang, 23 Juli 2026

Sekretaris,

Dra. Rakhmiah, M.H.

NIP. 197102022003022003